

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk**

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Secara astronomis Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111°5' sampai dengan 111°13' Bujur Timur dan 7°20' sampai dengan 7°50' Lintang Selatan<sup>81</sup>. Secara geografis Kabupaten Nganjuk memiliki batas-batas sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek<sup>82</sup>. Pada wilayah bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, wilayah bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun, Kediri, serta wilayah bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Dengan wilayah yang luasnya 122.433,1 Ha, Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan<sup>83</sup>.

Nganjuk adalah kabupaten penyumbang padi yang cukup besar di Jawa Timur. Berdasarkan data Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2012 luas panen padi sawah tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan dari 73.978 Ha menjadi 71.114 Ha, namun demikian produksinya mengalami kenaikan dari 4.465.336,94 Kw menjadi

---

<sup>81</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka*, (Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk, 2018), hal. 3-4.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

4.902.964,04 Kw atau mengalami kenaikan 9,80 %<sup>84</sup>. Demikian pula untuk rata-rata produksi mengalami peningkatan dari 60,36 Kw/ha menjadi 68,92 kw/Ha. Untuk Padi gogo/ Tegalan, luas panen, produksi dan rata-rata produksi mengalami peningkatan. Tahun 2010 luas panen padi gogo adalah 4.665 ha dan tahun 2011 meningkat menjadi 5.457 Ha dengan produksi tahun 2010 adalah 211.938,28 Kw meningkat menjadi 334.930,33 Ha. Produksi jagung di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 ini merata di semua kecamatan. Produksi tertinggi di Kecamatan Pace sebesar 297.468,18 Kw dan terkecil di Kecamatan Prambon sebesar 21.739,20 Kw. Total produksi jagung di Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 sebesar 2.128.091,94 Kw<sup>85</sup>.

Sektor pertanian masih merupakan sektor dominan di Kabupaten Nganjuk, terutama Pertanian Tanaman Pangan. Hal ini tercermin pada sumbangan sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih sangat besar bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Nganjuk atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai 23.376,17 milyar rupiah naik sekitar 10,77 persen dari tahun 2016 yang mencapai 21.102,92 milyar rupiah<sup>86</sup>. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (2010) tahun 2016 mencapai 15.502,19 milyar rupiah, naik sekitar 5,67 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 15.661,82 milyar rupiah. Sampai dengan tahun 2017

---

<sup>84</sup> Sippa.ciptakarya.pu.go.ig

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka* ,..Hal

perekonomian Kabupaten Nganjuk masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan 2017 sekitar 31,57 persen. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Nganjuk distribusi persentase PDRB ADHB terhadap total PDRB selalu diatas 30 persen. Sektor lainnya yang memberi sumbangan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Nganjuk adalah sektor perdagangan. Sumbangan sektor perdagangan ditahun 2017 hampir mencapai 20 persen<sup>87</sup>.

Penduduk di Kabupaten Nganjuk memeluk beragam agama dan kepercayaan, Secara sosio-religius masyarakat Nganjuk juga beragam. Jika dilihat secara demografis masyarakat Nganjuk memang mayoritas memeluk Agama Islam, sisanya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan agama lain. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk penganut agama Islam ada 1.078.322, Kristen 6.932, Katolik 2.832, Hindu 388, Budha 290, Konghucu 64, dan agama/kepercayaan lain ada 788 orang<sup>88</sup>. Masyarakat Nganjuk juga masih menjalankan dan melestarikan adat istiadat, upacara-upacara ritual maupun upacara kalenderikal. Adanya tradisi Nyadran menandai jika ada titik temu antara Islam dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Sedangkan pada upacara-upacara kalenderikal seperti perayaan Maulud (Kelahiran Nabi Muhammad SAW) atau Syu'roan ( Tahun Baru Islam)

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> <https://nganjukkab.bps.go.id/statictable/2019/01/15/109/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-nganjuk-2015.html>, diakses pada tanggal 27 April 2020

masyarakat Nganjuk merayakan dengan ekspresi yang bermacam-macam bahkan tidak hanya dirayakan oleh Umat Islam namun juga oleh non muslim yang cukup banyak di Kabupaten Nganjuk. Selain itu dalam masyarakat Hindu juga merayakan dan melaksanakan ritual Melasti sebelum Hari Raya Nyepi.<sup>89</sup>

Untuk aspek kebudayaan masih mengacu pada kebudayaan Jawa meskipun dalam perkembangannya dipengaruhi juga oleh kebudayaan Melayu, Eropa/Belanda dan Cina. Untuk sistem sosial kemasyarakatan yang berkembang mencakup sistem gotong royong dan kebersamaan, yang pada umumnya bersifat swadaya dan atas dasar kerelaan dari masyarakat, hal ini terkait dengan faktor rasa saling membutuhkan antar masyarakat, artinya masyarakat secara tidak langsung menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri<sup>90</sup>. Kesenian tradisional di Nganjuk antara lain, Tari Tayub, Wayang Timplong, Tari Mung Dhe, Jaranan.

## **B. Situasi Politik pada Pemilu 2019 di Nganjuk**

Secara Nasional Pemilu 2019 diikuti oleh 16 Partai Politik di tingkat pusat dan 4 Partai lokal di Aceh, dari 16 partai politik ada 9 partai yang mendapat perolehan suara di atas empat persen atau dinyatakan lolos ambang batas minimal parlemen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 7.968 calon anggota DPR RI dalam daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2019. Penetapan itu diputuskan dalam rapat pleno. Dari total 7.968 calon anggota legislatif yang maju dari 16 partai politik

---

2020 <sup>89</sup> <http://kongres.kebudayaan.id/profil-budaya-nganjuk/> diakses pada tanggal 20 April

<sup>90</sup> Sippa.ciptakarya.pu.go.ig

nasional tersebut, 4.774 orang di antaranya laki-laki dan 3.194 perempuan. Adapun total keterwakilan perempuan dalam DCT caleg ini sebesar 40 persen<sup>91</sup>. Dari Kabupaten Nganjuk ada 12 daftar calon tetap/ DCT, yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan<sup>92</sup>.

untuk DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ada 1.574 calon dari 16 partai politik, 640 perempuan dan 934 laki-laki<sup>93</sup>. Dari Nganjuk sendiri ada 10 laki-laki dan 5 Perempuan dari 8 Partai Politik<sup>94</sup>. Partai-partai tersebut adalah Golkar, Partai Berkarya, PKS, PPP, PSI, PAN, Hanura, dan Demokrat<sup>95</sup>.

**Tabel 4.2 Daftar Perolehan Kursi di 'Indrapura' (sebutan lain untuk DPRD Jatim)<sup>96</sup>**

No	Partai	Perolehan kursi
1.	PDI Perjuangan	27
2.	PKB	25
3.	Partai Gerindra	15
4.	Partai Demokrat	14
5.	Partai Golkar	13
6.	Partai Nasdem	9
7.	PAN	6
8.	PPP	5
9.	PKS	4
10.	HANURA	1
11.	PBB	1

<sup>91</sup> Fahreza Rizky, "KPU Tetapkan 7.968 Caleg DPR RI Peserta Pemilu 2019" <https://news.okezone.com/read/2018/09/20/606/1953370/kpu-tetapkan-7-968-caleg-dpr-ri-peserta-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

<sup>92</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-caleg-dpr-ri-di-jawa-timur-1544155971345508916/full>, diakses pada tanggal 27 April 2020.

<sup>93</sup> <https://kpujatim.go.id/dct-pemilu/> diakses tanggal 20 April 2020

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> <https://www.tagar.id/nama-120-anggota-dprd-jatim-terpilih-20192024>, diakses tanggal 20 April 2020

Namun Caleg dari Nganjuk yang kebanyakan dari Dapil 11 belum ada yang berhasil menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2019 ini.

Berikut adalah tabel untuk Caleg terpilih DPRD Provinsi Jawa Timur 2019.

**Tabel 4.3 Caleg Terpilih DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019<sup>97</sup>**

No	Nama Partai	Jumlah Dapil	Calon terpilih	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	14	25	14	11
2.	Partai Gerindra	14	15	15	-
3.	PDI Perjuangan	14	27	20	7
4.	Partai Golkar	14	13	13	-
5.	Partai Nasdem	14	9	8	1
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	14	4	4	-
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14	5	4	1
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	6	6	-
8.	Partai Hanura	14	1	1	-
9.	Partai Demokrat	14	14	13	1

Rapat pleno KPU Jawa Timur menetapkan sebanyak 120 calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur yang akan menjabat selama periode 2019-2024. Dari 120 calon terpilih 20 diantaranya perempuan dan 100 laki-laki<sup>98</sup>. Dari tabel diatas didapat bahwa PDIP menjadi Partai yang mendapat kursi terbanyak dalam Pemilu DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019.

<sup>97</sup> <https://www.lensaIndonesia.com/2019/05/13/nama-nama-caleg-yang-lolos-sebagai-anggota-dprd-provinsi-jatim-2019-2024.html>, diakses tanggal 27 April 2020

<sup>98</sup> <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/kpu-tetapkan-120-calon-terpilih-anggota-dprd-jatim-pdip-terbanyak/>, diakses tanggal 20 April 2020

Pada pemilu Nasional Tahun 2019 di Nganjuk sendiri, Caleg terpilih DPRD Kabupaten Nganjuk ada 50 orang, dari 493 calon, 313 diantaranya adalah laki-laki, dan 180 perempuan. Partai yang mengikuti hanya ada 15 Partai politik, diantaranya PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB<sup>99</sup>.

Tabel 4.4 Calon terpilih DPRD Kabupaten Nganjuk 2019<sup>100</sup>

No	Nama Partai	Jumlah DCT	Calon terpilih	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	49	9	9	-
2.	Partai Gerindra	49	6	4	2
3.	PDI Perjuangan	48	13	9	4
4.	Partai Golkar	50	5	2	3
5.	Partai Nasdem	43	3	1	2
6.	Partai Garuda	8	-	-	-
7.	Partai Berkarya	23	-	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	41	2	2	-
9.	Partai Perindo	20	1	1	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	24	2	1	1
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	15	-	-	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	22	-	-	-
13.	Partai Hanura	50	6	6	-
14.	Partai Demokrat	46	3	2	1
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	5	-	-	-

Sebanyak 50 calon terpilih anggota DPRD Nganjuk hasil Pemilu 2019 telah ditetapkan oleh KPU Nganjuk. Dari 50 calon terpilih yang akan menduduki kursi di DPRD tersebut, terdapat 13 orang perempuan dan 37

<sup>99</sup> <https://www.kpud-nganjukkab.go.id/pemilu-2019-pileg-pilpres/pemilu-legislatif/dct-dprd-kabupaten-nganjuk.html>, diakses tanggal 20 April 2020

<sup>100</sup> <http://www.dprdnganjukkab.go.id/profil.php>, diakses tanggal 22 April 2020

orang laki-laki. Partai yang paling banyak mendapat kursi adalah PDIP dengan total 13 kursi,serta Caleg terpilih perempuan terbanyak berdasarkan tabel tersebut juga dari PDIP.

### **C. Pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik diwajibkan untuk tunduk pada aturan dasar yang disepakati oleh mereka sendiri dalam forum tertinggi atau lebih dikenal dengan AD/ART.<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 j juga menyebutkan bahwa Partai Politik berhak untuk memiliki dan membentuk Sayap Partai. Sayap Partai secara organisasi penting bagi perkembangan partai politik. Fungsi Sayap Partai bagi Partai Politik selain sebagai cara Partai untuk mendekati dengan konstituen, juga bisa merubah cara pikir masyarakat terhadap citra suatu Partai Politik. Partai Politik memiliki bidang-bidang maupun Sayap Partai yang siap membantu Partai Politik dalam pemilu maupun dalam masyarakat. Semua Partai Politik mempunyai SayapPpartai baik dalam bentuk sayap ataupun badan lainnya yang mempunyai fungsi serupa sayap<sup>102</sup>. Salah satu Sayap Partai atau Badan Otonom Partai Politik adalah bidang khusus perempuan, yang mempunyai fungsi untuk membantu partai dalam kepengurusan maupun di masyarakat.

---

<sup>101</sup> Ahmad Gelora Mahardika, *Integrasi Sayap .....*

<sup>102</sup> *Ibid.*



Dalam tulisannya di Seminar Nasional Simposium Hukum Tata Negara, menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Peran yang dapat dijalankan Badan Otonom atau Organisasi Sayap Partai Politik yaitu sebagai sarana memperluas partisipasi masyarakat (publik) dalam menjalankan demokrasi, dan sebagai sarana memperjuangkan dan menyalurkan kepentingan yang diwakili Organisasi Sayap Partai, Organisasi Sayap Partai dapat berperan sebagai sumber dan pembawa gagasan yang menjadi garis perjuangan partai<sup>103</sup>.

Data yang berhasil dikumpulkan dari dokumen partai politik berupa AD/ART Partai Politik menunjukkan bahwa beberapa Partai Politik mengatur tentang Badan Otonom atau Sayap Partai Politik dalam AD/ART nya. Beberapa AD/ART mengatur tentang Badan Otonom atau Organisasi Sayap Perempuan, yang lainnya hanya menyebutkan tentang lembaga atau bidang perempuan. Seperti contohnya Golkar yang menyebutkan Sayap Perempuannya dalam AD/ART Partai tersebut, sedangkan untuk PDIP hanya menyebutkan mengenai Lembaga/bidang perempuan<sup>104</sup>.

Partai Politik memiliki berbagai macam sayap partai dengan berbagai jenis anggota, seperti sayap pemuda yang merekrut dan menyalurkan aspirasi pemuda pemudi dalam partai, sayap perempuan yang membidangi khusus perempuan, dan beberapa partai juga memiliki

---

<sup>103</sup> Bagir Manan, "Organisasi Sayap Partai Politik", *Prosiding*, dalam Simposium Nasional Hukum Tata Negara, 2019.

<sup>104</sup> AD/ART Partai Politik

sayap khusus mahasiswa contohnya seperti PKB yang memiliki Gema Saba atau Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa.

Pada Pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 Partai Politik ditingkat pusat dan 4 Partai lokal di Aceh, semua partai politik mempunyai sayap partai baik dalam bentuk sayap ataupun badan lainnya yang mempunyai fungsi serupa sayap. Namun hanya ada 9 Partai Politik yang mendapat kursi di parlemen. Berikut data yang bisa penulis dapatkan dari berbagai sumber

**Tabel 4.5 Sayap Partai Perempuan dalam AD/ART Partai<sup>105</sup>**

No	Nama Partai	Sayap Partai perempuan dalam AD/ART
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Diatur (disebutnya badan otonom)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Tidak disebut (disebutnya organisasi sayap)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Tidak disebut (disebutnya lembaga/ bidang)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Diatur (disebutnya organisasi sayap)
5	Partai Nasdem	Tidak disebut (disebutnya lembaga atau badan otonom)
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tidak Diatur
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Diatur (disebut badan otonom)
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	Tidak Disebut (disebut lembaga dan organisasi otonom)
9	Partai Demokrat	Tidak disebut (disebutnya organisasi sayap)

Dalam Partai Politik memiliki beberapa Badan Otonom atau Sayap Partai dengan berbagai bidang, salah satunya khusus perempuan, yang akan di jelaskan lebih detail dalam wawancara dengan beberapa ketua dan

<sup>105</sup> AD/ART Partai Politik

pengurus yang bersangkutan dalam Sayap Partai atau Badan Otonom Perempuan.

Tabel 4.6 Sayap Perempuan Partai Politik di Nganjuk<sup>106</sup>

No	Nama Partai	Nama Sayap Partai/Badan Otonom Perempuan	Fungsi	Tujuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (Perempuan Bangsa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai wadah berhimpun serta bergerak kaum perempuan baik anggota, pendukung maupun simpatisan,</li> <li>- Sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam rangka menegakkan hak-hak asasi perempuan dalam semua aspek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pengembangan partai, mewadahi kelompok perempuan, lebih jauh untuk mewadahi aspirasi politik perempuan melalui jalur PKB</li> <li>- Untuk memperjuangkan hak politik perempuan di Indonesia yang mayoritas adalah Nahdliyin</li> <li>- Mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat yang demokrasi adil dan makmur serta mewujudkan tatanan sosial dan politik yang berkesetaraan dan keadilan gender yang Rohmatilalamin<sup>107</sup>.</li> </ul>
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Perempuan Indonesia Raya (PIRA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu seluruh kegiatan Partai</li> <li>- Mencari kader perempuan</li> <li>- Memenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menggerakkan perempuan-perempuan karena menurut Gerindra perempuan bisa</li> </ul>

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan pengurus-pengurus Partai Politik di Nganjuk

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fitrotin Najilah Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Nganjuk pada tanggal 3 Februari 2020

			Undang-Undang Partai Politik memenuhi kuota 30% pengurus partai di masing-masing wilayah	menjadi penentu kemenangan <sup>108</sup> .
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Komite Perempuan Kesehatan dan Anak	- Sebagai jembatan antara Partai dengan masyarakat untuk bidang perempuan, seperti : Posyandu, PKK	- Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan <sup>109</sup> .
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)	- Untuk mewadahi aspirasi perempuan	- Untuk mewadahi aspirasi perempuan, disamping keputusan KPU bahwa 30% caleg harus wanita <sup>110</sup> .
5	Partai Nasdem	Garnita Malahayati	- Untuk mewadahi dan jembatan aspirasi perempuan	- Untuk mengajarkan kader perempuan mengaktualisasi diri ke publik, berkomunikasi yang baik - Agar perempuan tidak tabu untuk masuk ke dunia politik <sup>111</sup> .
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)	- Sebagai sarana komunikasi - Sebagai pembelajaran politik masyarakat - Sebagai wahana informasi aktivitas dakwah PKS yang berkaitan dengan anak dan keluarga	- Mencita-citakan masyarakat madani (keluarga-masyarakat-negara) - Keluarga menjadi pondasi untuk menjadi kuat dan bermartabat <sup>112</sup> .
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)	- Sebagai jembatan untuk meyakinkan masyarakat khususnya	- Untuk mewadahi aspirasi perempuan - Untuk mencari massa

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno Ketua DPC Gerindra pada tanggal 6 Januari 2020

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tante Setyowati Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak pada tanggal 28 Januari 2020

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Firman Adi Soeryo Bhawono Sekretaris DPD Golkar pada tanggal 23 Desember 2019

<sup>111</sup> <https://www.partainasdem.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Ketua BPKK Nganjuk pada tanggal 13 Januari 2020

			perempuan dalam Pemilu <sup>113</sup> - Untuk menggerakkan perempuan	
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	Perempuan Amanat Nasional (PUAN)	- Untuk menggerakkan perempuan-perempuan yang dianggap pasif di politik, - Mengadvokasi perempuan yang terkena masalah - Membela hak perempuan	- Untuk mencari massa - Untuk menjaring konstituen <sup>114</sup> .
9	Partai Demokrat	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)	- Untuk mewadahi aspirasi perempuan	- Untuk menyalurkan aspirasi perempuan dan menjadi jalur perempuan untuk semakin berperan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa fungsi dan tujuan Badan Otonom/Sayap Partai Perempuan hampir serupa yaitu menggerakkan perempuan, menampung aspirasi perempuan dan untuk memenuhi kuota 30% seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, namun beberapa Partai tidak memiliki Badan Otonom/Sayap Partai perempuan tetapi memiliki Bidang atau komite khusus perempuan yang koneksinya langsung ke dalam struktur Partai Politik.

Berikut adalah penjelasan masing-masing:

a) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sesuai dengan AD/ART Pasal 33 Badan Otonom menurut PKB adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan

<sup>113</sup> <https://www.pppjatim.or.id/peranan-penting-wanita-persatuan-pembangunan-di-pemilu-2019/> diakses tanggal 2 Desember 2020

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq Sekretaris DPD PAN pada tanggal 28 Januari 2020

kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat<sup>115</sup>. Badan Otonom khusus perempuan PKB juga sudah disebutkan dalam AD/ART pasal 33 ayat 4 ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa.

“Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa dulunya disingkat PPKB namun pada Muktamar tahun 2014 singkatannya menjadi Perempuan Bangsa, di Nganjuk sendiri Banom ini berdiri sekitar tahun 1998-1999. Dibentuk berdasarkan rapat harian sesuai tingkatannya, di Nganjuk melalui musyawarah tingkat cabang dan dipilih secara aklamasi. Secara organisasi Banom ini di formalkan di AD/ART dan strukturnya dibawah PKB berdasarkan segmen atau kelompok, sama dengan Banom selain perempuan ada segmen Pemuda yaitu Garda Bangsa, ada segmen Mahasiswa yaitu Gema Saba, segmen komunitas, segmen Barak Bangsa<sup>116</sup>”

Badan Otonom Perempuan PKB dibentuk berdasarkan rapat harian DPC, yang sistemnya ikut dengan partai, pada Periode Ibu Fitrotin ber SK tanggal 12 Juni 2017. Alasan pembentukan Perempuan Bangsa ini untuk mewadahi kelompok dan aspirasi perempuan., karena menurut PKB kuota perempuan lebih banyak dibanding laki-laki sehingga menyerap aspirasi dan mengambil suara perempuan mutlak dibutuhkan. Selanjutnya, Badan Otonom Perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam Partai Politik, menurut Ibu Siti Fatonah selaku Bendahara Perempuan Bangsa.

---

<sup>115</sup> AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan ibu Fitrotin Najilah Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Nganjuk pada tanggal 3 Februari 2020

“ Perempuan Bangsa memiliki peran yang sangat penting, apalagi kuota perempuan lebih besar dibanding laki-laki dari segi jumlah, maka dari itu menyerap aspirasi perempuan dan mengambil suara perempuan adalah mutlak dibutuhkan. Sehingga perempuan harus masuk ke masyarakat untuk menjaring massa, sedangkan untuk bisa menjadi anggota Perempuan Bangsa ini pun sama seperti umumnya, yaitu harus perempuan, punya hak dipilih dan memilih, Warga Negara Indonesia, dan yang paling penting bukan kader partai lain, dan untuk pembinaan anggota kami ada kaderisasi melalui pelatihan, atau melalui *recruitmen* saat pencalegan<sup>117</sup>.”

Terkait ketentuan keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan legislatif untuk perempuan, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Perempuan Bangsa memiliki Program yang berkaitan dengan hal tersebut, dalam wawancara dengan Ibu Diyah Ayu Sofiyanti S.Pd. selaku Sekretaris Perempuan Bangsa Kabupaten Nganjuk,

“ Memang salah satu program dari Perempuan Bangsa ini adalah Pembekalan Caleg perempuan dan penguatan saat Pemilu, guna membantu kader perempuan menghadapi Pemilu, namun diluar itu kami juga memiliki program untuk membantu masyarakat seperti membantu makanan tambahan dalam Posyandu untuk ibu dan anak, Pelatihan, untuk saat ini mengenai anggaran yang didapat dalam melaksanakan program-program tersebut berasal dari Induk sesuai tingkatannya, karena di Kabupaten kami mendapatkannya dari DPC PKB namun pada saat adanya Mukhtar PB hanya bisa menjadi peserta dalam Organisasi induk.<sup>118</sup>”

Perempuan Bangsa tidak bisa menjadi sebuah lembaga ataupun maju sendiri saat adanya Mukhtar, Perempuan Bangsa bisa menjadi peserta namun ikut dalam Partai Kebangkitan Bangsa sebagai

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan ibu Siti Fatonah Bendahara Perempuan Bangsa Kabupaten Nganjuk pada tanggal 3 Februari 2020.

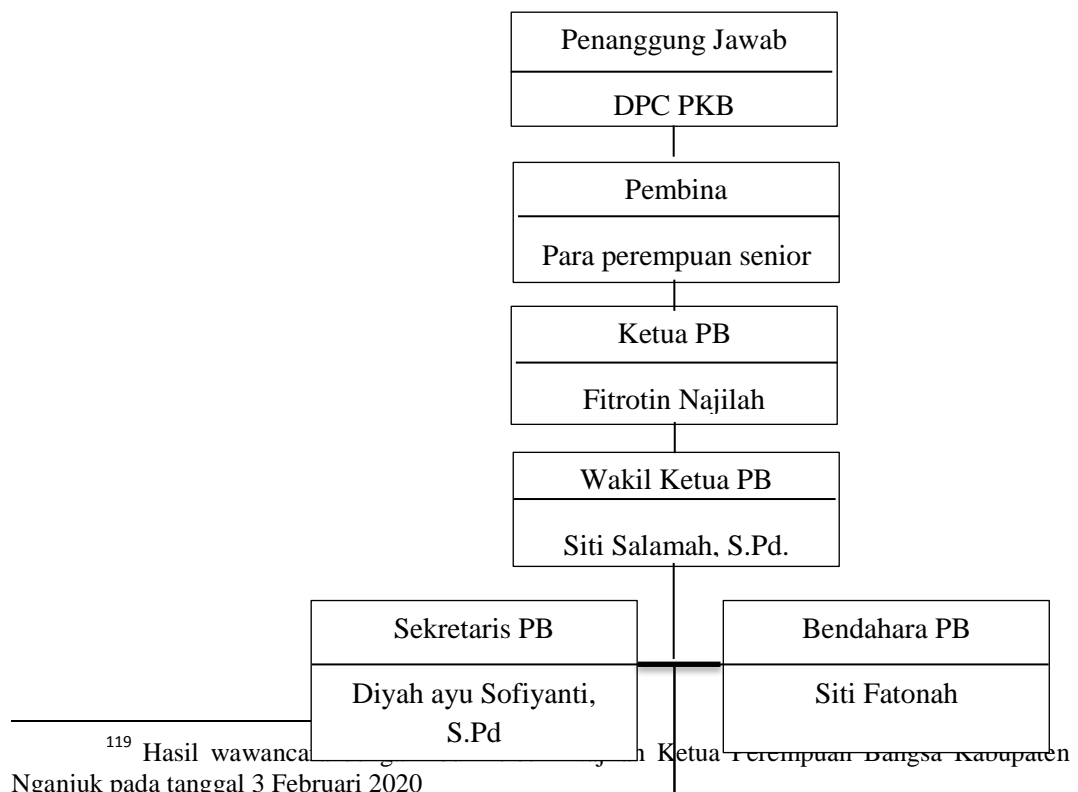
<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan ibu Diyah Ayu Sofiyanti Sekretaris Perempuan Bangsa Kabupaten Nganjuk pada tanggal 3 Februari 2020.

perwakilan dari Perempuan Bangsa. Ibu Fitrotin juga menambahkan dalam wawancaranya, menurut beliau :

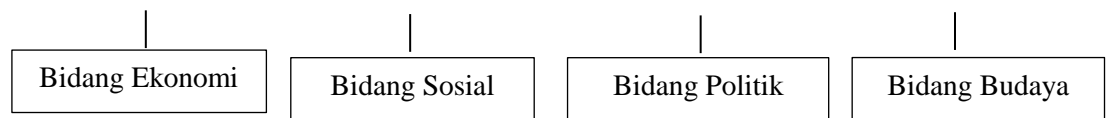
“ Perempuan Bangsa memperjuangkan aspirasi dibidang pendidikan miliknya Muslimat, Pengembangan IT untuk peningkatan SDM perempuan, pengembangan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi, dalam pemilu kemarin pun Partai dan PB mengupayakan kader/caleg perempuan harus berada diantara nomor urut 1 sampai 3, namun untuk Pemilu kali ini dari PKB belum ada yang berhasil menjadi anggota, saya sendiri maju menjadi caleg dan didukung oleh Partai<sup>119</sup>.”

Di Nganjuk aktivis Perempuan Bangsa diantaranya ada Ibu Fitrotin selaku Ketua, ada Ibu Fathonah dan Ibu Diyah Ayu Shofiyanti, menurut Ibu Fitrotin latar belakang para perempuan yang menjadi anggota Perempuan Bangsa ialah siapapun perempuan yang ingin berpolitik bisa menjadi anggota Perempuan Bangsa.

#### Struktur Organisasi Perempuan Bangsa







#### b) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya dan bangun badannya, serta partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang<sup>120</sup>. Menurut Bapak Sukarno selaku Ketua DPC Partai Gerindra, di Kabupaten Nganjuk sendiri Partai Gerindra dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008, sedangkan untuk Sayap Partai perempuannya di bentuk pada tahun 2009.

“PIRA atau Perempuan Indonesia Raya dibentuk pada tahun 2009 mengenai tepatnya saya kurang ingat, perannya dalam Partai Gerindra sendiri ialah membantu pelaksanaan kegiatan partai di masing-masing tingkatan untuk menggaet para konstituen perempuan, dalam membentuk PIRA dibantu oleh Partai, misal di Desa ada tokoh perempuan itu diajak. Berdasarkan instruksi partai, perempuan harus punya wadah, prosesnya mencari bibit-bibit perempuan yang berpotensi bisa membesarkan partai. Alasan pembentukan PIRA sendiri karena dalam pencalegan harus ada 30% perempuan. Kriteria untuk bisa menjadi anggota PIRA antara lain WNI, berkedudukan di wilayah setempat, tidak menjadi anggota partai lain, bisa/berpotensi untuk jadi wakil rakyat. Untuk struktur organisasi PIRA tidak jauh beda dari partai, ada ketua, sekretaris, bendahara dan ketua-ketua bidang disesuaikan

<sup>120</sup> AD/ART Partai Gerindra

kearifan daerahnya, ketua bidang yang ada di Nganjuk meliputi koperasi,keagamaan,tanaman hias,pertanian. Sayap partai ini di formalkan dengan AD/ART namun kewenangannya tidak melebihi Badan. Di Kabupaten Nganjuk aktivis PIRA antara lain Ibu Umiarti, Ibu Sri Handayani, dan Ibu Dia Putri Aruma. Yang bersangkutan memiliki latar belakang antara lain sebagai istri mantan Camat, pedagang pasar, tokoh agama.<sup>121</sup>”

Menurut Bapak Sukarno PIRA di Nganjuk berdiri pada tahun 2009,pada tahun yang sama salah satu aktivis PIRA yaitu Ibu Dia Putri Aruma menjadi Anggota DPRD Komisi III periode 2009-2014 sehingga dia juga menjadi salah satu pelopor PIRA di Nganjuk, saat ini beliau kembali berhasil menduduki Jabatan Anggota Komisi IV DPRD periode 2019-2024, selanjutnya adalah Ibu Umiarti,dan Ibu Sri Handayani beliau juga sempat menjadi Anggota DPRD komisi III periode 2014-2019.

Dalam sebuah organisasi maupun Badan pasti memiliki program untuk masyarakat dan pembinaan untuk anggotanya, hal itu juga berlaku pada PIRA untuk meningkatkan kualitas dan SDM.

“PIRA melakukan kaderisasi setiap bulannya lewat arisan anjungsana, mengenai kegiatan PIRA bekerja sama dengan DPRD masing-masing dapil, seperti pelatihan memasak, membuat bawang goreng karena di Nganjuk cukup banyak petani bawang merah, kegiatan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi, pengalaman PIRA dalam memperjuangkan aspirasi itu mengikuti reses masing-masing anggota dewan, mekanismenya lewat reses, ada yang berhasil ada juga yang tidak, contoh yang berhasil itu seperti pembinaan Balita atau Posyandu.<sup>122</sup>”

---

2020 <sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno Ketua DPC Gerindra pada tanggal 6 Januari

2020 <sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno Ketua DPC Gerindra pada tanggal 6 Januari

Keterwakilan 30% untuk kuota perempuan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang. Partai Gerindra juga sudah mengupayakan kader perempuannya dalam pencalegan.

“Pemilu 2019 kemarin, dari Gerindra ada 1 anggota perempuan yang berhasil mendapat suara dan maju menjadi anggota dewan, yaitu Ibu Dia Putri Aruma S.Pd yang saat ini menjadi anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Nganjuk. pencalonan legislatif semuanya didukung oleh Partai.<sup>123</sup>”

Dari data diatas didapat bahwa Partai Gerindra dan PIRA mampu membawa 1 anggota perempuannya maju menjadi anggota dewan di Kabupaten Nganjuk. Namun mengenai SK Pembentukan PIRA menurut penuturan Bapak Sukarno, SK sampai dengan saat ini belum turun pengajuan, sehingga baik PIRA maupun partai Gerindra belum memiliki SK dan Struktur kepengurusan PIRA yang baru.

#### c) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dalam AD/ART PDIP, PDI Perjuangan memahami Partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi (TRI SILA), serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno Ketua DPC Gerindra pada tanggal 6 Januari 2020

bernegara (EKA SILA). Selain itu, bagi PDI Perjuangan partai merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan dari perjuangan politik<sup>124</sup>.

PDIP tidak memiliki sayap perempuan namun dalam AD/ART disebutkan memiliki Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak. Di Nganjuk PDIP memiliki Komite Perempuan, Kesehatan dan Anak yang berada dibawah naungan Bidang Perempuan dan Anak. Komite ini cukup aktif di masyarakat, menurut Ibu Tante Setyowati selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak, salah satu program yang diusulkan oleh Komite Perempuan, Kesehatan, dan Anak dan ajakan dari buruh guna memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei adalah pembangunan Monumen Marsinah.

“Untuk memperingati hari buruh pada tanggal 1 Mei para buruh dan Komite Perempuan, Kesehatan dan Anak mengusulkan untuk membangun monumen Marsinah dan sekarang sudah teralisasi, sudah di bangun monumen tersebut, selain itu mengenai program lain kami mengikuti dari DPD lalu diolah lagi menjadi program khusus. Setiap bulan rutin ada pertemuan untuk membahas problem dari masyarakat, saat ini dari tingkat kecamatan sudah dibentuk untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, salah satu program yang kemarin sudah dijalankan itu membantu menyuplai makanan ke duda janda yang tidak memiliki kerabat<sup>125</sup>.”

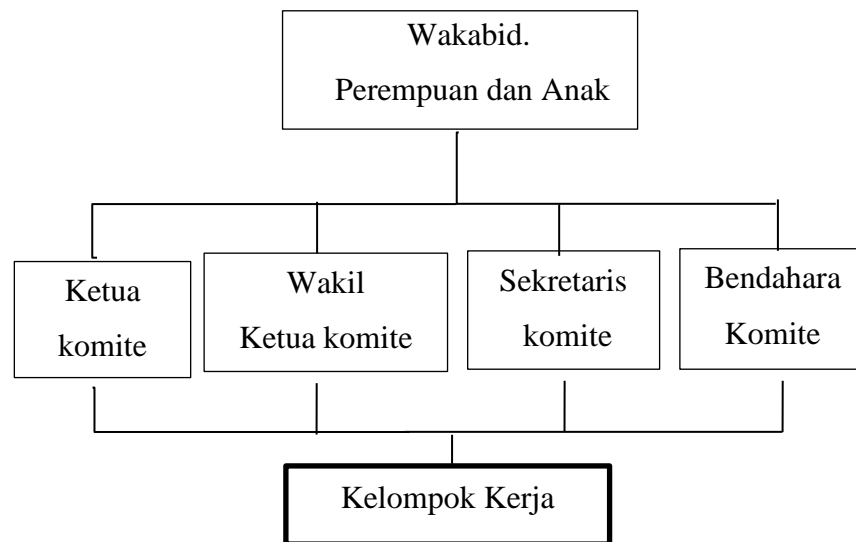
Menurut Ibu Tante Komite Perempuan, Kesehatan, dan Anak dulunya bernama Departemen Wanita. Dan hubungan formalnya secara

---

<sup>124</sup> AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tante Setyowati Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak pada tanggal 28 Januari 2020

kultural, sehingga jika dibentuk skema struktur organisasinya menurut beliau seperti ini,



Program Kelompok kerja:

- a) Pendidikan, Politik, Kaderisasi perempuan
- b) Perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan (memberikan layanan konsul (tim advokasi), pendampingan dan konsul gratis)
- c) Kesehatan perempuan dan anak (Sosialisasi masalah aids, Stunting narkoba).<sup>126</sup>

“ Mengenai anggaran yang didapatkan untuk program kami dapat dari DPC, selain itu komite berperan juga sebagai lumbung suara dalam Partai, dulunya bernama Departemen Wanita, mungkin sekitar 25 tahun lalu, sekarang sudah berubah menjadi komite ini,

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tante Setyowati Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak pada tanggal 28 Januari 2020.

pembentukan dilakukan 5 tahun sekali seperti struktural partai (melalui voting), Komite Perempuan mengajukan nama lalu diserahkan lewat DPC berlaku untuk memilih ketua, namun jika ingin menjadi anggota komite ini semua perempuan yang mau berkomitmen terhadap kegiatan, walaupun diluar partai bisa masuk namun disaat mereka mau berkomitmen otomatis masuk partai, biasanya lewat anak ranting baru ke cabang, untuk di Nganjuk sendiri yang sudah ada anak ranting aktif berada di Jaticalen sejak 2 tahun lalu. Pembinaan anggota sebenarnya ada kaderisasi karena ketua Komite menjadi pengurus juga pengacara jadi ada terobosan juga bekerja sama dengan Dinas. Sayangnya saat ada acara seperti Rakernas komite ini tidak bisa menjadi sebuah lembaga istilahnya hanya sebagai penggembira<sup>127</sup>.”

Mengenai calon anggota Komite Perempuan, Kesehatan, dan Anak menurut Bu Tante semua perempuan yang ingin bergabung dipersilahkan meskipun itu diluar PDIP, asalkan mau berkomitmen terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Perempuan, Kesehatan, dan Anak. Namun saat sudah menjadi anggota dan mau berkomitmen terhadap Komite maka harus masuk ke dalam PDIP. Ini menjadi salah satu cara untuk menarik perempuan agar menjadi aktif dalam Komite maupun Partai.

Karena adanya aturan keterwakilan 30% bagi perempuan yang mana diantara 3 caleg harus ada 1 perempuan. PDIP berhasil membawa 4 perempuan dari 15 yang maju sebagai calon legislatif, dimana 3 diantaranya anggota Komite Perempuan.

“Iya dari PDIP ada 4 yang berhasil menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, setiap dapil ada 3 perempuan jadi ada 15 yang maju, dari dapil 2 ada 2 yang berhasil yaitu Ibu Anik Rahayu, SE dan Ibu Suwarsi, S.Sos keduanya berasal dari Komite Perempuan,

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tante Setyowati Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak pada tanggal 28 Januari 2020.

dari dapil 1 ada 1 orang yaitu Ibu Trisna Roosita, S.Pd, dari dapil 5 ada 1 yaitu Dra. Wiwin Sudilah beliau juga dari Komite Perempuan. Untuk kader perempuan yang maju menjadi caleg ada yang didukung oleh partai ada juga yang sebagai aksesoris untuk memenuhi kuota.<sup>128,,</sup>

Dari data diatas didapat bahwa perempuan PDIP mendapat 4 kursi, yang 3 diantaranya berasal dari Komite Perempuan, Kesehatan dan Anak. Lebih jelasnya, Dra. Wiwin Sudilah menjabat sebagai Bendahara Fraksi, Ibu Trisna Roosita, S.Pd menjabat di Badan Anggaran (Banggar), Ibu Anik Rahayu, S.E dan Ibu Suwarsi menjabat di Badan Musyawarah (Bamus). Menurut Ibu Tante Badan Otonom atau Sayap Partai Perempuan dibentuk sebagai kepanjangan tangan Partai, dengan adanya Badan Otonom/Sayap Partai Perempuan diharapkan keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun struktur partai terpenuhi. Semua anggota Sayap Partai menjadi aktivis untuk membesarkan partai maupun untuk menjalankan program sesuai intruksi dari DPP, latar belakang nya pun bermacam karakter, menurut Ibu tante ada yang dari advokasi, guru, anggota legislatif, petani, pedagang, perias dan lain-lain.

#### d) Partai Golongan Karya (Golkar)

Dalam AD/ART Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan terus menerus

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tante Setyowati Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak pada tanggal 28 Januari 2020

dalam meningkatkan karya dan kekaryaan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat semangat cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong timbulnya tuntunan agar pembaharuan dilaksanakan dengan mengembangkan reformasi di segala bidang<sup>129</sup>. Menurut AD/ART pasal 25 tentang Organisasi Sayap, Partai Golkar memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Diperjelas lewat ART pasal 21 tentang Organisasi Sayap bahwa Partai Golkar memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG). Namun di Nganjuk sayap partai/badan otonom yang aktif selain KPPG adalah HWK atau Himpunan Wanita Karya.

“Di Nganjuk yang aktif itu ada KPPG dan HWK, ketuanya HWK Ibu Maria Tunda Dewi S.Sos, M.Si yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, HWK sendiri masih dalam naungan Bidang Pemberdayaan perempuan, selain HWK, Bidang Pemberdayaan perempuan dan KPPG juga aktif dalam masyarakat. Golkar sudah berdiri cukup lama di Nganjuk dan untuk KPPG kurang lebih sudah ada 30 tahun. Perannya adalah sebagai organisasi yang khusus membidangi kegiatan perempuan. Secara struktural oleh Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, selain hubungannya di formalkan dengan AD/ART, hubungan organisasionalnya pun secara langsung karena sebagai Wakil Ketua.<sup>130</sup>”

---

<sup>129</sup> AD/ART Partai Golkar

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Firman Adi Soeryo Bhawono Sekretaris DPD Golkar pada tanggal 23 desember 2019



Dalam pembentukan sayap partai atau badan otonom perempuan ini menurut Bapak R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H, M.M selaku Sekretaris DPD Golkar, ialah melalui Musyawarah Dasar (Musda) yang sistemnya ikut dengan Partai, karena hubungan organisasional sayap partai dengan partai politik adalah formal dan adanya kebijakan *ex officio* dimana ketua sayap partai perempuan merangkap menjadi Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan sehingga sayap partai memiliki koneksi secara langsung ke dalam struktur partai. Menurut beliau KPPG sudah ada kurang lebih 30 tahun yang lalu mengenai data kapan dan lebih detailnya beliau kurang tau karena disaat beliau dipilih menjabat menjadi Sekretaris DPD berkas dan arsip suratnya tidak ada.

“Untuk bisa menjadi anggota harus menjadi anggota Partai Golkar, pembinaan secara otomatis dibawah pembinaan DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk. Latar belakang terutama untuk menjadi KPPG harus aktivis, partai memantau perempuan yang aktif di lapangan dan bisa juga di Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kebanyakan anggota KPPG juga dari GOW. Program-program dan kegiatan KPPG mengikuti dari DPD Partai Golkar karena memang masuk dalam struktur, tidak berdiri sendiri.”

Latar belakang anggota KPPG adalah aktivis dan kebanyakan berasal dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Pada pemilu tahun 2019 kader perempuan dari Partai Golkar berhasil menempati 3 kursi DPRD Kabupaten Nganjuk, yang salah satu nya Ketua HWK Kabupaten Nganjuk.

“Ada yang menjadi caleg bahkan menjadi anggota DPRD, pencalonan didukung oleh Partai.”<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Bapak R. Firman Adi Soeryo Bhawono Sekretaris DPD Golkar pada tanggal 23 Desember 2019

Dari data diatas didapat bahwa partai Golkar sudah memenuhi ketentuan kuota 30% bahkan ada 3 kader perempuannya yang berhasil menduduki kursi DPRD. Yaitu Ibu Anke Sing Lestari, S.Pd. menjabat sebagai Sekertaris FPG (Fraksi Partai Golkar), Ibu Maria Tunda Dewi, S.Sos, M.Si. menjabat sebagai Panitia Anggaran dalam DPRD Nganjuk, dan Ibu Hj. Dwi Retno Sulistyowati S.E. menjabat sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nganjuk.

e) Partai Nasdem

Tidak Berhasil ditemui

f) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menurut AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Partai ini pertama kali didirikan pada tahun 2002 dan memiliki visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>132</sup>.

PKS tidak memiliki sayap perempuan namun memiliki Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang mempunyai fungsi serupa sayap, di Nganjuk juga memiliki BPKK yang di ketuai oleh Ibu Sri Rahayu.

---

<sup>132</sup> AD/ART Partai Keadilan Sejahtera

“BPKK di Nganjuk berdiri pada tahun 2009, awalnya bernama Bidpuan atau Bidang Perempuan, di Jakarta Bidang Perempuan berdiri pada tanggal 9 Agustus 1998 sedangkan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga pada 20 April 2002 didirikan oleh Dra. Wirianingsih, Msi beliau berhasil menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi I. BPKK ini *include* dengan PKS yang merupakan penjabaran dari visi PKS jadi kami tidak berdiri sendiri. Dalam Partai, BPKK menjadi penguatan dari PKS seperti dimensi asasi maksudnya mencakup peran sebagai pribadi, istri, ibu dan lebih luasnya sebagai anggota masyarakat.<sup>133</sup>”

Selain berkegiatan di partai, BPKK juga terjun ke masyarakat, karena maraknya perempuan yang terjun ke politik beberapa kasus para perempuan maupun ibu-ibu kurang bisa membagi waktu dan peran. Ibu Sri menambahkan bahwa latar belakang dibentuknya BPKK sesuai dengan BPKK Pusat yang ada di Jakarta, keluarga sebagai unit sosial dasar dan terpenting dalam proses pembentukan masyarakat, dapat menentukan baik dan buruknya sebuah masyarakat. Mencermati merebaknya fenomena munculnya tantangan dan ancaman terhadap tatanan keluarga, maka perlu ada upaya-upaya untuk mengembalikan keluarga sesuai fungsinya. PKS sebagai partai politik yang memiliki visi menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk ummat, Bangsa dan Negara, PKS menjadikan isu keluarga sebagai isu penting dalam program pelayanan, pemberdayaan dan advokasi. Menurut Ibu Sri program-program dari BPKK bisa jadi membantu masalah di masyarakat yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga.

“ BPKK memiliki 4 devisi, yaitu devisi Rumah keluarga Indonesia, devisi peningkatan kapasitas kader perempuan, devisi hubungan kelembagaan perempuan, devisi kajian perempuan,

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Ketua BPKK Nganjuk pada tanggal 13 Januari 2020

masing-masing devisi memiliki penanggung jawab tapi dari ke 4 devisi menjadi 1 kegiatan, BPKK sendiri lebih fokus ke RKI karena lebih bisa diterima seluruh lapisan masyarakat. Program dari RKI pun menjadi program pokok BPKK.<sup>134</sup>“

Program Pokok BPKK : Rumah Keluarga Indonesia (RKI)

- 1) Sekolah Ibu (mengajarkan para ibu bagaimana adab makan, menyusui, untuk anak)
- 2) Pembinaan Lansia
- 3) Pos ekonomi (Bank sampah, pelatihan keterampilan)
- 4) Pendidikan orang tua dan anak
- 5) Sahabat anak dan remaja
- 6) Harmonisasi suami istri
- 7) Pembekalan pra nika
- 8) Pendidikan politik keluarga.

“Untuk saat ini mengenai anggaran untuk program didapat dari DPD dan kader, untuk program pembekalan pra nikah biasanya ada infaq dari yang mengikuti kegiatan tersebut. Sasaran dari program-program ini untuk seluruh lapisan masyarakat, dan jika ada yang ingin bergabung untuk anggota RKI bisa dari segala umur baik kader maupun non kader, namun untuk anggota BPKK harus dari kader RKI<sup>135</sup>.”

Pada pemilu tahun 2019 kemarin, PKS dan BPKK mengupayakan kader perempuan untuk bisa maju menjadi anggota dewan, namun pada pemilu tahun 2019 belum ada kader perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif.

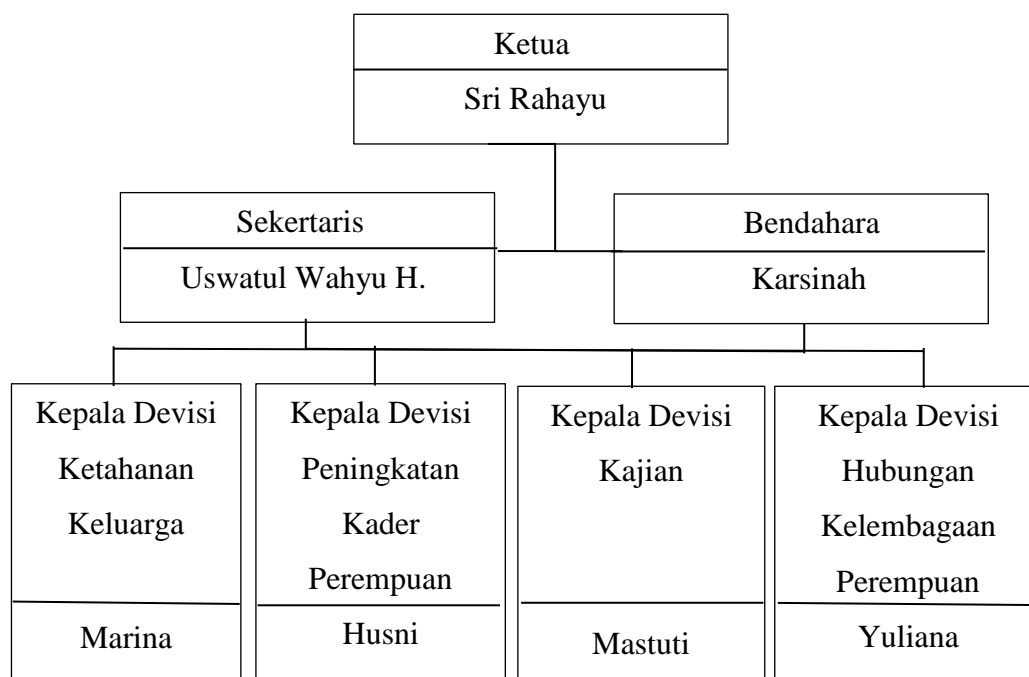
---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Ketua BPKK Nganjuk pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Ketua BPKK Nganjuk pada tanggal 13 Januari 2020.

“Hampir setiap caleg perempuan berasal dari BPKK, dibantu dana dari DPD, kalau kondisi belum memungkinkan sebagai pendukung saja, pada pemilu kemarin dari dapil 1 dan 3 yang berhasil di Nganjuk, tetapi bukan perempuan.<sup>136</sup>”

Menurut Ibu Sri stuktur kepengurusan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kabupaten Nganjuk, antara lain:



Dari data diatas didapat bahwa PKS tidak memiliki sayap partai perempuan dalam AD/ART nya, namun memiliki Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang merupakan penjabaran visi dari PKS, pada pemilu tahun 2019 kemarin PKS belum berhasil membawa caleg perempuannya menjadi anggota legislatif.

g) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu Ketua BPKK Nganjuk pada tanggal 13 Januari 2020.

Tidak berhasil ditemui, namun dari percakapan singkat melalui media WhatsApp dari Ibu Ika salah satu Pengurus PPP, bahwasanya Badan Otonom atau Sayap Partai Perempuan PPP tidak begitu aktif, sehingga tidak efektif.

h) Partai Amanat Nasional (PAN)

Menurut AD/ART Partai Amanat Nasional bertujuan mewujudkan Indonesia baru yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu PAN memiliki badan khusus yang disebutnya organisasi otonom, fungsinya menurut AD/ART ialah membantu Dewan Pimpinan Partai melakukan konsolidasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang dan atau kelompok-kelompok tertentu guna mencapai tujuan partai<sup>137</sup>. Organisasi otonom mempunyai fungsi serupa sayap, PAN memiliki berbagai macam organisasi sayap salah satunya di bidang perempuan yang bernama Perempuan Amanat Nasional (PUAN), di Nganjuk Partai Amanat Nasional berdiri tahun 1998, kemudian pada tahun 1999 sayap-sayap partai mulai dibentuk, salah satunya PUAN.

“ PUAN dibentuk ketika partainya sudah di sahkan, sekitar tahun 2004, kalau tidak salah tanggal 25 Desember 2004. Perannya sangat signifikan karena dalam AD/ART dijelaskan sehingga selalu di ikutkan dalam kongres, dan sebagainya. Meskipun jika ada

---

<sup>137</sup> AD/ART Partai Amanat Nasional

kongres bisa hadir sebagai peserta tetapi perwakilan, dan punya hak suara dan hak bicara. Hubungannya pun secara organisasional seperti simbiosis mutualisme atau saling membantu dan menguntungkan.<sup>138</sup>”

Mengenai pembentukan, PUAN di Nganjuk menerapkan sistem musyawarah, dalam wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq selaku Sekretaris DPD PAN Kabupaten Nganjuk, menurut beliau :

“Pembentukan dengan cara musyawarah, mengisi pos-pos pengurus, kalau musyawarah bisa diadakan voting tetapi untuk calon-calon ketuanya itu diusulkan. Sedangkan jika ingin menjadi anggota yang pertama harus taat Pancasila, kedua paham AD/ART, ketiga siap berjuang untuk partai dan yang paling penting tidak boleh merangkap partai lain, minimal berumur 17 atau sudah mempunyai hak pilih. Terkait pembinaan anggota lewat kaderisasi, ada LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar), LKAM (Latihan Kader Amanat Madya), dan LKAU (Latihan Kader Amanat Utama).<sup>139</sup>”  
Pada tahun 2020 ini PUAN dan PAN memperjuangkan aspirasi

perempuan di pengadilan perihal kasus KDRT dan berhasil. Menurut Bapak Rofiq itu termasuk dalam program PUAN .

“Program-program PUAN itu seperti mengadvokasi perempuan, workshop-workshop, tentang pembelaan perempuan dan sarannya tidak hanya perempuan tapi semua masyarakat, dalam menyelenggarakan program anggaran didapatkan dari kontribusi dewan, bantuan dari partai, jumlahnya tergantung. Ada juga anggaran khusus untuk PUAN.“

PAN juga mengikuti aturan 30% keterwakilan perempuan saat pencalegan namun pada Pemilu tahun 2019 kemarin kader perempuan PAN belum ada yang berhasil.

“Pemilu kali ini belum ada yang berhasil namun setiap ada pencalegan dari perwakilan PUAN harus maju menjadi caleg, rata-

---

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq Sekretaris DPD PAN pada tanggal 28 Januari 2020

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq Sekretaris DPD PAN pada tanggal 28 Januari 2020

rata mereka maju karena keinginan sendiri dan Partai mendukung penuh hal tersebut.<sup>140</sup>,

Dari data diatas didapat bahwa PAN memiliki organisasi khusus perempuan bernama PUAN dan harus mengikutkan perwakilannya menjadi caleg, namun pada pemilu 2019 kemarin belum ada kader perempuannya yang berhasil maju menjadi anggota legislatif. Menurut Bapak Rofiq pelopor PUAN di Nganjuk salah satunya adalah Hj. Nisti Andarniyati namun beliau hanya membantu dalam mendirikan, tidak maju menjadi calon legislatif, pelopor lainnya adalah Ibu Sundari dan Hj. Matoni, latar belakang anggota PUAN kebanyakan dari Muhammadiyah, namun ada juga yang dari NU. Menurut beliau tujuan pembentukan PUAN untuk mengumpulkan perempuan digerakkan untuk berpolitik, memberdayakan perempuan karena ada banyak kuota perempuan sayang bila tidak di salurkan dengan baik.

i) Partai Demokrat

Tidak berhasil ditemui

#### **D. Pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019 ditinjau dari Siyasah Syariah**

Agama Islam telah mengatur tentang kehidupan manusia, begitupun dengan peran perempuan. Berkaitan dengan Pembentukan Sayap Perempuan Partai Politik ditinjau dari siyasah syariah peneliti menemui salah satu ulama yang paham mengenai siyasah yaitu Bapak Nasir al Hambal, S.Ag.,M.Pd.I, beliau adalah Ketua NU Ranting Desa Kedungrejo,

---

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq Sekretaris DPD PAN pada tanggal 28 Januari 2020



Kabupaten Nganjuk, beliau lulusan S2 di IAIT Tribakti Kediri, yang saat ini aktif menjadi Pendidik di Madrasah di Prambon, Nganjuk, beliau juga pernah mengabdikan dan mondok di Pondok pesantren Darunnajah, di Kediri, adapun hasil wawancara berikut

“Memang secara umum ada 2 pandangan dari Ulama, Klasik dan Kontemporer mengenai perempuan. Dari Ulama Madzhab, perempuan peranannya memang terbatas, perempuan hanya memiliki peran domestik atau dalam keluarga/rumah tangga. Karena dalam ayat Al-Qur’an di surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa harus laki-laki yang menjadi pemimpin atas perempuan. Sedang menurut Ibnu Jarir malah membolehkan bahwa perempuan selain dalam rumah tangga/domestik juga bisa diluar domestik. Ulama Kontemporer dengan dasar Istinbath hukum dari nash Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, tidak hanya penafsiran ulama dahulu, diperluas lagi dengan istihsan, illat, selain itu pengaruh pandangan dunia barat cukup mempengaruhi Islam Kontemporer jika dilihat dengan kondisi saat ini.<sup>141</sup>”

Ada 2 Pendapat mengenai peran perempuan diluar perannya dalam Keluarga. Ada yang membolehkan ada pula yang tidak, namun tetap dengan dasar yang sama yaitu Al-Qur’an. Menurut Bapak Nasir al Hambal, S.Ag.,M.Pd.I turunya Surat An-Nisa ayat 34 ternyata memiliki asbabun nuzul karena ada konflik rumah tangga, sehingga Allah menurunkan Firman-Nya bahwa laki-laki menjadi pelindung perempuan.

“Dalam Al-Qur’an sendiri ternyata tidak ada ayat yang menyatakan secara tegas bahwa perempuan tidak boleh berperan diluar perannya dalam keluarga/rumah tangga, dibanding masa sekarang jelas berbeda dengan jaman dahulu, Islam setelah khulafur rasyidin yang 4 itu bentuknya bukan lagi kekhalifahan, memang keislamannya masih kental namun ada sultan/raja sehingga lebih berbentuk kerajaan. Pada jaman kerajaan atau federal ada kekuasaan absolut sehingga hukum pun tentu berbeda, dalam masa ini perempuan mulai dipertimbangkan untuk boleh berperan diluar

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasir al Hambal, S.Ag.,M.Pd.I pada tanggal 22 April 2020

peran domestik, contohnya mengenai perempuan yang berperan diluar domestik misal menjadi pemimpin atau masuk dalam politik adalah pernah ada Sultan wanita di masa kesultanan Delhi,itu pertama dalam Islam. Bahkan sebelum itu dari Negeri Saba dengan Negerinya yang makmur ternyata dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ratu Bilqis, jika dari Indonesia sendiri ada dari Samudra Pasai sekitar tahun 1200 an kalau tidak salah dipimpin oleh seorang perempuan, di Aceh pernah ada riwayat di pimpin oleh perempuan sudah 4x,usia kerajaan ini sama dengan kerajaan Majapahit. Namun jika dilihat dari kondisi sekarang perempuan diperbolehkan berperan diluar peran domestiknya, contoh dalam Munas NU di Nusa Tenggara Barat tahun 1997, dan Mukttamar di Lirboyo tahun 1999, bahwa perempuan dapat memperluas peranannya dengan dasar-dasar tawasul/seimbang tapi jangan lupa dengan peranan domestiknya. Jika mengangkat dari hadis bahwasanya tidak ada nash secara jelas melarang bahwa keterwakilan didalam politik. Beberapa ulama klasik,yaitu Ulama Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili.<sup>142</sup>,

Dalam hal ini Bapak Nasir al Hambal, S.Ag.,M.Pd.I memaparkan bahwa, Perempuan boleh berpolitik maupun menjadi pemimpin asal seimbang dengan peran domestiknya yaitu dalam rumah tangga. Selain itu sudah banyak contoh perempuan yang mampu menyeimbangkan perannya diluar kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga. Bapak Nasir juga menambahkan bahwa,

“Ibnu Hazm pernah berkata bahwa boleh saja perempuan memegang suatu wewenang/hukum, sehingga perempuan boleh berperan maupun terlibat didalam politik”

Pendapat dari Ulama Maliki juga ada yang menyebutkan bahwasanya perempuan boleh menjadi orang diwasiatkan atau orang yang diwakili, hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi dari pembentukan Badan Otonom/ Sayap Perempuan Partai Politik.

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasir al Hambal, S.Ag.,M.Pd.I pada tanggal 22 April 2020

### **E. Pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019 ditinjau dari Hukum Positif**

Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif perempuan adalah salah satu capaian penting demokrasi Indonesia pasca reformasi. Dibentuknya Badan Otonom/Sayap partai Perempuan menjadi salah satu lumbung rekrutmen Partai Politik secara khusus bagi perempuan. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 pasal 12j bahwa Partai Politik berhak membentuk dan memiliki Organisasi Sayap Partai Politik. Namun tidak dijelaskan secara detail mengenai pembentukan Sayap Partai/Badan Otonom, hal itu juga dipaparkan oleh Bapak Ahmad Gelora Mahardika, M.H

“ Sayap Partai bisa konsen di bidang pemuda, perempuan, dan lainnya. Dan dalam Undang-Undang hanya ada 1 pasal yang menyebutkan tentang organisasi sayap partai, itu pun tidak ada teknis pembentukan maka terserah partai akan dibentuk seperti apa, sehingga mengenai proses pembentukan diserahkan pada AD/ART Partai<sup>143</sup>”.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, hanya menyebutkan bahwa Partai Politik berhak memiliki dan membentuk Organisasi Sayap Partai, namun tidak menyebutkan proses pembentukannya sehingga itu menjadi kewenangan mutlak Partai Politik mengatur sendiri dalam AD/ART nya.

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Gelora Mahardika, M.H pada tanggal 12 April 2020

“ Karena dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tidak mengatur mendetail, akhirnya itu menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, salah satu alternatifnya lewat Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Ormas terbagi dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, untuk Ormas berbadan hukum bisa berbentuk perkumpulan atau yayasan, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Disisi lain, terdapat ormas yang tidak berbadan hukum dan cukup didaftarkan saja di Kementerian Dalam Negeri. Ada pula yang murni sayap partai, yang masih dalam bagian Partai berdasarkan AD./ART, untuk yang sebagai Ormas seperti sayap Partai Nasdem yang memang didaftarkan sebagai Ormas berbadan hukum. Namun meskipun bentuk sayap partai politik bervariasi, ketiganya secara organisasi mempunyai kesamaan yaitu tunduk kepada DPP Partai Politik.<sup>144</sup>”

Menurut pemaparan Pak Gelora, Pembentukan Sayap Partai menjadikan kewenangan mutlak Partai. Melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Ormas yang terbagi dapat berbentuk Ormas berbadan hukum, seperti sayap partai Nasdem yang didaftarkan sebagai Ormas berbadan hukum, Ormas tidak berbadan hukum, dan murni Sayap Partai yang berdasarkan AD/ART. Secara kelembagaan sayap memang berbentuk Ormas, namun secara aktivitas merupakan bagian internal dari Partai Politik yaitu sebagai media Partai untuk menggaet konstituen dan menciptakan narasi positif di masyarakat. Oleh karena itulah, Sayap Partai Politik secara kelembagaan mutlak bagian dari Partai Politik<sup>145</sup>.

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Gelora Mahardika, M.H pada tanggal 12 April 2020.

<sup>145</sup> Ahmad Gelora Mahardika, Integrasi Sayap.....

## **F. Temuan Penelitian**

### 1. Pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019

- a) Pembentukan sayap partai baik dalam bentuk sayap ataupun badan lainnya yang mempunyai fungsi serupa sayap, dibantu oleh induk atau partai masing-masing. Seperti contohnya Partai Golkar dan PAN yang proses pembentukannya melalui musyawarah, PKB berdasarkan rapat harian kemudian diajukan ke musyawarah cabang, dasar hukum masing-masing sayap perempuan partai berdasarkan AD/ART masing-masing partai politik. Contohnya, Partai Golkar dalam Anggaran Dasar Pasal 25 disebutkan bahwa pembentukan organisasi sayap mengikuti Pusat, lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 21 bahwa Organisasi sayap memiliki kewenangan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatannya sesuai bidang/kelompok strategisnya. Badan Otonom PKB sudah diatur dalam ART PKB pasal 33, dan rata-rata setiap AD/ART Partai mengatur ketentuan lebih lanjutnya tentang Badan Otonom/Sayap partai perempuan dalam Peraturan Organisasi.
- b) Pembinaan anggota sayap ataupun badan lainnya khusus perempuan dengan kaderisasi, berupa perekrutan perempuan-

perempuan yang dianggap mau dan mampu dalam bidang politik, dan lainnya, ada juga yang melalui pelatihan-pelatihan.

- c) Sayap perempuan/ badan otonom perempuan maupun bidang perempuan umumnya mempunyai fungsi yang sama, selain menarik partisipan perempuan, menyalurkan aspirasi perempuan, membantu perempuan dan masyarakat, juga membuat perempuan lebih aktif di organisasi maupun masyarakat.
- d) Partai peserta Pemilu 2019 di Nganjuk memiliki sayap ataupun badan lainnya yang mempunyai fungsi serupa sayap, untuk PKS dan PDIP memiliki bidang khusus perempuan yang langsung terhubung dengan induk (partai). Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS include dengan PKS, yang juga merupakan penjabaran dari visi PKS, sedangkan Komite Perempuan Kesehatan Anak dibawah naungan Bidang Perempuan dan Anak, dimana Bidang ini masuk dalam Struktur organisasi Induk (Partai).
- e) Anggaran untuk program-program sayap partai/badan otonom maupun bidang-bidang didapat dari DPC dan DPD Partai masing-masing.
- f) Dalam acara resmi Partai, Badan Otonom/Sayap Partai hanya bisa menjadi peserta dalam organisasi induk (Partai), atau sebagai perwakilan Badan Otonom/ Sayap Partai Perempuan.

- g) Semua Partai mendukung caleg perempuannya untuk maju menjadi anggota legislatif, namun jika kondisi tidak memungkinkan ada juga yang hanya sebagai pendukung atau sekedar aksesoris untuk memenuhi kuota 30%.
- h) Dari data diatas bahwa masih banyak kader perempuan yang pasif, dan Badan Otonom atau Sayap Partai Perempuan belum mencapai tujuannya untuk menyalurkan perempuan menjadi Anggota legislatif, buktinya banyak caleg perempuan yang tidak terpilih sebagai anggota DPRD. Dan masih ada Badan Otonom/ Sayap Partai Perempuan terkesan hanya dimanfaatkan sebagai pencari massa perempuan, tapi kurang serius dikader agar jadi politisi yang mumpuni. Namun beberapa prestasi dari Badan Otonom atau Sayap Partai Perempuan Partai Politik di Nganjuk dapat dirasakan oleh masyarakat, misal Bidang Perempuan dan Anak PDIP bersama buruh yang berhasil mengusulkan dan membangun Monumen Marsinah di area Sukomoro, Nganjuk. Partai Golkar yang memiliki HWK dan KPPG yang sudah dikenal dan berkontribusi dalam masyarakat. Partai PKS dan PKB melalui programnya dapat membantu Para Ibu Hamil dan menyusui.

## 2. Pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019 ditinjau dari Siyasah Syariah

Ada 2 pendapat dari ulama fiqh klasik dan ulama fiqh kontemporer mengenai peran perempuan, diluar perannya dalam keluarga, yaitu mengenai pendapat bahwa perempuan tidak boleh berperan diluar perannya dalam keluarga/rumah tangga, dan pendapat bahwa perempuan diperbolehkan berperan diluar peran domestiknya. Dengan adanya pendapat-pendapat dari Ulama-ulama dengan dilihat dengan situasi dan kondisi masa ini perempuan mulai diperbolehkan berperan diluar peran domestiknya, namun harus seimbang antara peran dalam keluarga dengan peran diluar. Sehingga menurut Fiqh Siyasaah perempuan boleh berpolitik maupun menjadi pemimpin asal seimbang dengan peran domestiknya yaitu dalam rumah tangga. Ulama yang membolehkan atau mempunyai pendapat serupa antara lain Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa perempuan boleh memegang suatu wewenang/hukum, Ibnu Jarir, dan Ulama Maliki yang membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, hal ini sejalan dengan pembentukan badan otonom/sayap perempuan partai politik. Selain itu sudah banyak contoh perempuan yang mampu menyeimbangkan perannya diluar kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga.

### 3. Pembentukan Badan Otonom Perempuan dalam Partai Politik peserta Pemilu 2019 ditinjau dari Hukum Positif

Ditinjau dari hukum positif, pembentukan sayap perempuan atau badan otonom partai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2



tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Pembentukan Sayap Partai menjadikan kewenangan mutlak Partai, karena dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tidak mengatur mendetail, akhirnya itu menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, salah satu alternatifnya lewat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Ormas terbagi dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, untuk Ormas berbadan hukum bisa berbentuk perkumpulan atau yayasan, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Disisi lain, terdapat ormas yang tidak berbadan hukum dan cukup didaftarkan saja di Kementerian Dalam Negeri. Ada pula yang murni sayap partai, yang masih dalam bagian Partai berdasarkan AD./ART. Namun meskipun bentuk sayap partai politik bervariasi, ketiganya secara organisasi mempunyai kesamaan yaitu tunduk kepada DPP Partai Politik

Secara kelembagaan sayap memang berbentuk Ormas, namun secara aktivitas merupakan bagian internal dari Partai Politik yaitu sebagai media Partai untuk menggaet konstituen dan menciptakan narasi positif di masyarakat. Oleh karena itulah, Sayap Partai Politik secara kelembagaan mutlak bagian dari Partai Politik.